

## **BAB III**

### **KONDISI SOSIAL MASYARAKAT MAJENANG TAHUN 1915-1935**

#### **3.1. Struktur Sosial Masyarakat Majenang**

Perkembangan suatu wilayah Kecamatan pada bidang ekonomi memberikan beberapa dampak terhadap hubungan sosial masyarakat. Perkembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Majenang memberikan perubahan pada hubungan sosial masyarakat Majenang. Pada periode 1915-1935 struktur dan kehidupan masyarakat Majenang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda.

Wilayah Majenang berada dalam sistem administratif kolonial sebagai distrik atau kawedanan di bawah *regents* Cilacap, sehingga pola kehidupan masyarakatnya juga berubah dari yang awalnya tradisional berubah menjadi sesuai kebutuhan kolonial Belanda terutama berkaitan dengan pertanian dan perkebunan komoditas. Pengaruh tersebut salah satunya berdampak terhadap struktur sosial masyarakat Kecamatan Majenang yang mulai beragam sejak diberlakukannya sistem liberalisasi ekonomi, atau bahkan lebih jauh dari itu.

Struktur sosial menggambarkan cara masyarakat disusun, termasuk kedudukan sosial, peran, kelompok, dan hubungan antarmanusia, serta sistem-sistem yang menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, struktur sosial adalah jaringan unsur-unsur sosial pokok dalam masyarakat, yang mencakup, (1) kelompok sosial, (2) stratifikasi sosial, (3) Lembaga sosial, (4) kekuasaan dan wewenang. Pada masa kolonial Belanda di Indonesia, struktur sosial masyarakat sengaja dibentuk

berdasarkan sistem pemisahan golongan yang kaku dan hierarkis, yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan dan kedudukan sosial.<sup>40</sup>

Pemerintah kolonial membagi penduduk menjadi tiga golongan utama: golongan Eropa, golongan Asia (terutama Tionghoa, Arab, dan India), dan golongan Pribumi.<sup>41</sup> Golongan Eropa, yang terdiri dari orang Belanda dan bangsa Barat lainnya, menempati posisi tertinggi dan menikmati hak-hak istimewa dalam bidang hukum, pendidikan, ekonomi, dan politik. Mereka tinggal di wilayah perkotaan yang tertata dan memiliki fasilitas lengkap. Golongan Asia Timur Asing berada di lapisan menengah; meskipun mereka tidak setara dengan orang Eropa, mereka diberikan beberapa hak dan peluang ekonomi, seperti dalam perekonomian dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan golongan Pribumi. Sementara itu, golongan Pribumi berada pada lapisan terbawah dan mengalami diskriminasi yang paling berat. Mereka dibatasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan diperlakukan secara berbeda dalam sistem hukum kolonial.

Pembagian ini mencerminkan struktur sosial kolonial yang sengaja dirancang untuk memperkuat dominasi Belanda, menciptakan ketimpangan sosial, dan membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat Pribumi. Sama seperti daerah lainnya di Hindia Belanda pada waktu itu, pembagian wilayah didasarkan pada golongan rasial atau etnis. Istilah penggolongan wilayah berdasarkan etnis ini disebut dengan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Raja Grafindo Persada, 1993).

<sup>41</sup> Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia* (KPG, 2025).

segregasi. Menurut Suryaningsih,<sup>42</sup> Segregasi merupakan pemisahan kelompok masyarakat dalam ruang perkotaan berdasarkan ciri sosial tertentu seperti ras, etnis, agama, ataupun status sosial ekonomi. Pemisahan ini menciptakan kawasan-kawasan yang homogen secara sosial dan kerap menghasilkan ketimpangan akses terhadap fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Dalam konteks sejarah, bentuk segregasi ruang terlihat nyata pada masa kolonial Belanda melalui kebijakan *wijkstelsel*, yang memisahkan tempat tinggal antara kelompok Eropa, Tionghoa, dan pribumi. Warga Eropa dan Tionghoa tinggal di pusat kota dengan fasilitas terbaik, sedangkan kelompok pribumi ditempatkan di pinggiran dengan sarana yang minim. Pemisahan ini tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga mencerminkan hierarki kekuasaan dan relasi sosial yang timpang.<sup>43</sup> Di Majenang pun terjadi demikian, karena beberapa wilayah seperti di Jenang dan Sindangsari itu diisi oleh rumah-rumah milik warga Belanda/Eropa, toko-toko milik etnis Tionghoa disepanjang jalan utama, dan untuk warga pribumi yang berada di pusat kecamatan Majenang adalah mereka yang berstatus sebagai priyayi dan *Pangreh Praja* atau para pejabat kolonial pada waktu itu. Sedangkan penempatan warga pribumi, mereka ditempatkan oleh pemerintah Belanda di seberang Sungai Cilopadang dan Sungai Cijalu di sebelah barat.

---

<sup>42</sup> Suryani Suryaningsih, ‘Segregasi Ruang Sosial Di Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Kampung Mongol, Kelurahan Tegallega, Kota Bogor)’ (Universitas Negeri Jakarta, 2022).

<sup>43</sup> Revina Putri Felissa, ‘Dampak Kebijakan Asimilasi Masa Pemerintahan Orde Baru Terhadap Perkembangan Identitas Sosial Budaya Etnis Tionghoa Tahun 1966-1998’ (Universitas Pendidikan Indonesia, 2024).

Struktur masyarakat yang ada di Kecamatan Majenang terdiri dari Pribumi Orang Eropa, Cina, dan Arab-Melayu. Golongan pertama adalah masyarakat Pribumi yang mengacu pada penduduk asli Majenang, di mana terdapat 2 etnis suku yang hidup berdampingan yaitu Jawa dan Sunda. Bahkan jumlah penduduk Sunda dengan Jawa hampir 2:1, padahal Majenang berada di wilayah yang termasuk ke dalam Jawa Tengah yang rata-rata beretnis Jawa. hal ini diungkapkan dalam buku Sensus yang dibuat oleh Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS) pada tahun 1930 yang memuat perbandingan jumlah etnis Sunda dan Jawa di Majenang.<sup>44</sup>

**Tabel 3. 1 Data Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Suku Sunda dan Jawa pada Tahun 1930**

Kecamatan	Suku	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>Majenang</b> (Cilacap)	Sunda	32.829	33.935	<b>66.764</b>
	Jawa	17.650	17.038	<b>34.688</b>
<b>Bandjarardja</b> (Brebes)	Sunda	24.255	26.073	<b>50.328</b>
	Jawa	47.106	50.173	<b>97.279</b>
<b>Bantarkawoeng</b> (Brebes)	Sunda	17.159	17.777	<b>34.936</b>
	Jawa	11.198	11.525	<b>22.723</b>
<b>Tandjoeng</b> (Brebes)	Sunda	8.989	9.654	<b>18.643</b>
	Jawa	58.315	63.208	<b>121.523</b>
<b>Sidaredja</b> (Cilacap)	Sunda	1.827	1.670	<b>3.497</b>
	Jawa	60.667	59.311	<b>119.978</b>

Sumber: *Census of 1930 in Netherlands India*

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Majenang (Cilacap) merupakan wilayah dengan jumlah penduduk Sunda tertinggi di luar wilayah administratif Jawa Barat. Dari total penduduk kecamatan ini, sebanyak

---

<sup>44</sup> Boeke and Wertheim, *INHEEMSCHE BEVOLKING VAN MIDDEN-JAVA EN DE VORSTENLANDEN* (*Census of 1930 in Netherlands India – Volume II: Native Population in Middle-Java and the Native States of Java*) (Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS), 1930).

66.764 jiwa adalah orang Sunda, sementara hanya 34.688 jiwa yang merupakan orang Jawa. Ini berarti mayoritas penduduk Majenang adalah etnis Sunda, dengan perbandingan hampir 2:1 dibandingkan penduduk etnis Jawa. Angka ini menunjukkan bahwa Majenang bukan sekadar wilayah transisi, tetapi benar-benar menjadi kantong utama suku Sunda di wilayah administratif Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Bandjarardja (Brebes), yang juga memiliki jumlah penduduk Sunda tinggi (50.328 jiwa), Majenang tetap menempati posisi pertama dalam hal total populasi Sunda. Sementara itu, di kecamatan Bantarkawoeng (Brebes), jumlah penduduk Sunda juga tinggi (34.936 jiwa), tetapi lebih seimbang dengan populasi Jawa (22.723 jiwa). Menariknya, wilayah-wilayah lain yang masih satu kabupaten seperti Sidareja dan Tandjoeng (Tanjung, Brebes) memiliki jumlah penduduk Sunda yang jauh lebih kecil dibandingkan orang Jawa. Sidareja misalnya, hanya memiliki 3.497 orang Sunda dari total lebih dari 120 ribu jiwa, menandakan bahwa pengaruh etnis Sunda di sana tidak dominan, berbeda dengan Majenang.

Kelompok orang-orang Sunda yang berada di Majenang ini Sebagian besar bekerja di sektor agraris, seperti petani, buruh tani, dan perkebunan. Seagaian kecil golongan pribumi Sunda di Majenang merupakan pedagang kecil di pasar tradisional atau pengrajin yang memproduksi barang seperti anyaman bambu, pengrajin dodol, dan kain batik. Berbeda dengan orang-orang Jawa biasanya mereka menjadi golongan priyayi yang merupakan lapisan atas masyarakat pribumi yang bekerja dalam pemerintahan kolonial seperti kepala distrik (asisten wedana), *pangreh praja*, dan aparat pemerintah lokal.

Kemudian, golongan yang menempati strata sosial tertinggi adalah para Pendatang Eropa. Pendatang Eropa ini yang merujuk pada pendatang dari Belanda atau negara negara Eropa lainnya yang umumnya bekerja sebagai pejabat kolonial, pemilik perkebunan, atau pengusaha besar. Mereka menduduki posisi tinggi dalam hierarki pemerintahan, seperti kontrolir atau administrator distrik.<sup>45</sup> Sebagian penduduk Eropa adalah pemilik perkebunan besar di daerah sekitarnya yang memproduksi komoditas ekspor seperti kopi atau karet. Akan tetapi berdasarkan menurut catatan sensus tahun 1930, populasi penduduk Eropa di Majenang ini semakin berkurang menjadi hanya tinggal 88,21% saja dibandingkan tahun 1920. Penduduk Eropa tersebut berkurang sebesar 11,79% dari total populasi pada tahun 1920. Menurut analisis peneliti, mereka banyak pindah ke Cilacap sebagai ibukota kabupaten yang baru. Perpindahan orang-orang Eropa tersebut terjadi karena dua faktor yaitu karena mutasi pekerjaan ataupun memindahkan usahanya ke Cilacap. Berikut ini data tabel lebih lengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut ini.

---

<sup>45</sup> Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial* (Obor Indonesia, 2016).

**Gambar 3.2. Pertumbuhan Penduduk Tahun 1930 Dinyatakan dalam Persentase Terhadap Tahun 1920**

Bevolking van 1930 uitgedrukt in % van 1920. <sup>45</sup>												TABEL 5			
Districtes Districts	Indiërs Native			Européens en geïngestelde Européens and unclassified persons			Chinezen -- Chinese			Andere Vreemde Oosterlingen Other Asiatics			Total -- Total		
	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majenang	197,96	137,21	197,01	70	117,05	94,21	293,02	246,15	298,00	249	216,07	207,21	138,26	137,31	137,38
Sidareja	189,44	186,50	187,87	133,52	200	185,06	254,48	239,45	247,79	—	—	—	189,27	186,53	188,14
Cilacap	187,34	127,07	187,05	134,57	138,45	135,06	149,19	149,82	144,50	219,23	186,56	205,56	127,01	128,30	127,82
Kroya	196,58	107,92	197,16	82,69	68	81,20	110,27	117,32	113,04	—	—	—	196,26	107,94	197,17

Sumber: *Census of 1930 in Netherlands India*<sup>46</sup>

Tabel pada gambar di atas memberikan perbandingan pertumbuhan penduduk dari berbagai kelompok etnis di beberapa distrik antara tahun 1920 dan 1930, termasuk distrik Majenang, Sidareja, Cilacap, dan Kroya. Sehingga, dapat diketahui bahwa penduduk Eropa menunjukkan total peningkatan sebesar 156,06% selama sepuluh tahun terakhir. Distrik lainnya yang mengalami peningkatan adalah Sidareja yang sama-sama mengalami pertumbuhan penduduk pendatang dari Eropa sebesar 156%. Gelombang perpindahan ke Sidareja masih belum diketahui penyebabnya karena sangat minim sekali sumber. Namun, dalam buku yang sama peneliti menemukan bahwa adanya wabah penyakit menjadi salah satu faktor mengapa mereka pindah ke Sidareja. Penurunan penduduk Eropa ini berbanding terbalik dengan orang-orang Tionghoa yang tumbuh sangat pesat di Majenang.

Sebelum membahas pertumbuhan penduduk Tionghoa, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu tentang kehadiran penduduk Etnis Tionghoa di Indonesia

<sup>46</sup> Boeke and Wertheim, *INHEEMSCHE BEVOLKING VAN MIDDEN-JAVA EN DE VORSTENLANDEN* (*Census of 1930 in Netherlands India – Volume II: Native Population in Middle-Java and the Native States of Java*).

yang ditempatkan sebagai golongan kelas menengah atau kelas dua dalam strata sosial yang dibentuk oleh kolonial Belanda.<sup>47</sup> Golongan ini berperan sebagai perantara antara golongan Eropa dengan golongan pribumi/*Inlander*. Golongan penduduk pendatang dari Cina merupakan kelompok terbesar di luar penduduk lokal yang menetap di Majenang, terutama sebagai pedagang, pemodal pertanian, dan pemilik usaha. Kelompok ini memainkan peran penting dalam perekonomian lokal sebagai penghubung antara produsen lokal dan pasar yang lebih besar.<sup>48</sup> Namun, mereka cenderung hidup terpisah secara sosial dari kelompok pribumi. Pendatang lainnya seperti Arab-Melayu lebih jarang ditemukan di wilayah ini pada periode tersebut karena Majenang bukan pusat perdagangan besar dibandingkan dengan kota-kota pelabuhan.

Data dari sensus penduduk Hindia Belanda tahun 1930 menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di distrik Majenang mengalami lonjakan populasi hingga 205,85% dibandingkan tahun 1920. Angka ini jauh melampaui kelompok pribumi (137,81%) dan kelompok Eropa (82,21%).<sup>49</sup> Kenaikan ini sejalan dengan laporan dari "*Onderzoek naar de oorzaken van de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera*" (Laporan Komisi Kemiskinan – 1914–1915) yang mencatat meningkatnya aktivitas ekonomi dan pergerakan penduduk non-pribumi, terutama

---

<sup>47</sup> Rahardjo Supratikno, *Pemukiman Lingkungan Dan Masyarakat* (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, 2007). Hlm. 46

<sup>48</sup> Afif Amirullah, ‘Sejarah Perkembangan Etnis Tionghoa Muslim Di Palembang’ (UIN Raden Fatah Palembang, 2018). Hlm. 43

<sup>49</sup> Boeke and Wertheim, *INHEEMSCHE BEVOLKING VAN MIDDEN-JAVA EN DE VORSTENLANDEN* (*Census of 1930 in Netherlands India – Volume II: Native Population in Middle-Java and the Native States of Java*).

kelompok Tionghoa, ke daerah-daerah baru yang sedang berkembang, seperti Majenang, akibat terbukanya infrastruktur transportasi dan pasar.

Sumber dari Mindere Welvaart Commissie tersebut mengindikasikan bahwa pedalaman seperti Majenang menjadi tujuan ekspansi perdagangan dan jaringan ekonomi Tionghoa, terutama setelah pembukaan jalur kereta api ke Cilacap tahun 1891. Jalur ini membuka akses Majenang terhadap kota pelabuhan dan pasar ekspor seperti Cilacap, menjadikan daerah ini strategis untuk distribusi hasil bumi dan komoditas ekspor. Terlebih komunitas Tionghoa memiliki peran penting sebagai pedagang perantara, pemilik toko, penyedia kredit informal, serta pelaku distribusi hasil bumi seperti kopi, karet, dan hasil hutan. Sehingga dapat menghidupkan perekonomian di wilayah tersebut.<sup>50</sup>

Dalam catatan *Volkstellingen* (sensus) tahun 1930 serta laporan administratif Belanda, disebutkan bahwa migrasi Tionghoa ke pedalaman cenderung bersifat keluarga, bukan hanya migrasi laki-laki pekerja. Hal ini dibuktikan dalam data yang cukup seimbang antara jumlah pria (206,13%) dan wanita (205,56%) Tionghoa yang pindah ke Majenang antara tahun 1920 dan 1930. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak hanya datang untuk berdagang atau bekerja, tetapi juga membentuk komunitas menetap, yang terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi lokal.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wafiq Ilma Maulidia, ‘Peran Etnis Tionghoa Dalam Perdagangan Padi Dan Jagung Di Desa Gumukmas Tahun 1998 – 2015’ (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024).

<sup>51</sup> Boeke and Wertheim, *INHEEMSCHE BEVOLKING VAN MIDDEN-JAVA EN DE VORSTENLANDEN* (*Census of 1930 in Netherlands India – Volume II: Native Population in Middle-Java and the Native States of Java*).

Kelompok terakhir berdasarkan dari sensus penduduk Hindia Belanda tahun 1930, yaitu kelompok *Andersche Vreemde Oosterlingen* atau "*Asia lainnya*" di distrik Majenang mengalami pertumbuhan sebesar 237,27% dibandingkan tahun 1920, dengan rincian laki-laki tumbuh sebesar 240% dan perempuan sebesar 213,64%. Ini merupakan salah satu angka pertumbuhan tertinggi dari seluruh kelompok etnis di Majenang selama periode tersebut, bahkan lebih tinggi dibandingkan komunitas Tionghoa.

Kelompok Asia lainnya dalam klasifikasi Belanda umumnya merujuk pada penduduk Asia non-pribumi dan non-Tionghoa, seperti keturunan Arab, India (termasuk Tamil dan Bengali), Melayu luar (misalnya dari Semenanjung Malaya atau Sumatra Timur), serta migran Asia Selatan dan Timur Tengah yang datang untuk berdagang atau berdakwah. Kelompok *Andersche Vreemde Oosterlingen* atau "*Asia lainnya*" ini seringkali terdiri dari pedagang, tuan tanah kecil, dan pemuka agama, terutama dari komunitas Arab Hadrami dan India Muslim.<sup>52</sup> Menurut laporan dari Onderzoek naar de oorzaken van de mindere welvaart (1915), keberadaan komunitas non-pribumi di wilayah pedalaman dianggap sebagai "stimulan ekonomi", meskipun sering juga dikaitkan dengan kompetisi ekonomi dengan penduduk pribumi. Pertumbuhan Asia lainnya di Majenang menunjukkan bahwa daerah ini telah menjadi bagian dari arus migrasi regional dan interregional

---

<sup>52</sup> Ahmad Jufri, 'Migrasi Orang Arab Hadramaut Ke Batavia Akhir Abad XVIII Awal Abad XIX' (UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

yang lebih luas, di mana interaksi ekonomi dan religius membentuk konfigurasi sosial baru di pedalaman Jawa.<sup>53</sup>

### **3.2. Perpindahan Penduduk Majenang**

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Majenang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dinamika pergerakan penduduk yang cukup signifikan, terutama dalam bentuk emigrasi, namun ada juga penduduk yang melakukan imigrasi ke Majenang karena dibukanya sarana transportasi ke wilayah tersebut. Perpindahan penduduk baik itu imigrasi dan emigrasi terjadi sebagai respons terhadap tekanan demografis dan lingkungan, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan lahan garapan, serta kondisi kesehatan yang buruk di wilayah tersebut.

Berdasarkan data dari *Onderzoek naar de oorzake van de mindere welvaart de inlandsche Bevolking op Java en Madoera* oleh *Mindere Welvaart Commissie* sekitar tahun 1915, menunjukkan bahwa adanya lonjakan dan peningkatan penduduk Majenang dan sekitarnya karena dibukanya jalur kereta api ke sana. Pergerakan penduduk di daerah Cilacap (Tjelatjap), Pegadingan, Majenang, dan Dayeuhluhur menunjukkan adanya dinamika emigrasi dan imigrasi yang cukup signifikan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sejak dibukanya jalur kereta api pada tahun 1891, Cilacap menjadi daerah strategis yang mendorong arus imigrasi besar-besaran dari wilayah sekitar.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> MWC, *Onderzoek Naar de Oorzaken van de Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera 1906-1914* (Albrecht and Co, 1915).

<sup>54</sup> MWC, *Onderzoek Naar de Oorzaken van de Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera 1906-1914*.

Fasilitas transportasi yang lebih baik membuat daerah ini lebih mudah diakses dan menarik minat penduduk dari daerah padat atau yang mengalami kesulitan ekonomi untuk berpindah ke Cilacap dan wilayah administratif di sekitarnya. Pegadingan, Majenang, dan Dayeuhluhur, juga mengalami perubahan. Penduduk dari wilayah sekitar seperti Bagelen (Banjarnegara, Purworejo, dan sekitarnya), Banyumas, dan Jawa Barat pindah ke Cilacap, Majenang, Pegadingan dan Dayeuhluhur karena berbagai faktor, seperti kesehatan lingkungan yang buruk, keterbatasan lahan pertanian, hingga keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah yang lebih subur atau memiliki infrastruktur yang lebih maju.<sup>55</sup>

Mereka yang pindah umumnya memiliki modal antara f100 sampai f300,<sup>56</sup> modal itu cukup bagi keluarga baru pada waktu itu untuk membeli sawah baru atau mendirikan tempat tinggal di lokasi tujuan. Pergerakan penduduk ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam proses migrasi internal di wilayah Jawa pada masa kolonial. Berikut data yang diperoleh dari hasil Sensus pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1930 tentang data penduduk imigrasi ke Majenang.

---

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

**Gambar 3. 3 Jumlah Imigran Ke Wilayah Cilacap Dari Berbagai Daerah Tahun 1930**

AANTAL IMMIGRANTEN IN TJIJLATJAP UIT BELANGRIKE EMIGRATIEGEBIEDEN. NUMBER OF IMMIGRANTS IN TJIJLATJAP FROM SOME IMPORTANT TERRITORIES OF EMIGRATION.															
Teksttabel — Subsidiary table No. 4.															
Uit: From:	Majenang					Sidareja					Tjiyatjap buiten de kotta				
	Mannen Males	Vrouwen Females	Total	In % v. tot. aantal imm.	Percent- age of the tot. number of immigr.	Mannen Males	Vrouwen Females	Total	In % v. tot. aantal imm.	Percent- age of the tot. number of immigr.	Mannen Males	Vrouwen Females	Total	In % v. tot. aantal imm.	Percent- age of the tot. number of immigr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oud-Bagelen .....	5 923	3 808	11 731	40,3		17 375	12 258	34 633	52,5		30 482	10 966	21 455	47,9	
Bdg. Tjiyatjap .....	2 004	2 158	4 162	15		8 261	7 056	16 317	24,6		3 626	3 486	7 012	16,1	
Blg. Banyumas (oosten regent-scheyden Karanganyar en Tjiyatjap) .....	3 648	3 318	7 160	24,0		4 393	4 745	9 733	14,7		7 280	7 538	14 939	33,4	
Bdg. Pekalongan .....	916	567	1 383	4,8		1 363	702	1 915	2,9		116	59	175	0,4	
West-Java .....	1 995	1 905	3 890	12,4		1 379	1 347	2 725	4,1		727	220	997	2,2	
Vorstenlanden .....	55	63	118	0,4		153	144	295	0,5		291	279	570	1,2	
Oost-Java .....	70	61	131	0,6		85	88	173	0,3		320	115	435	1	

Sumber: *Census of 1930 in Netherlands India – Volume II*<sup>57</sup>

Berdasarkan data dari Teksttabel No. 4 mengenai jumlah imigran ke wilayah Cilacap dari berbagai daerah penting emigrasi, terlihat bahwa arus migrasi terbesar ke distrik-distrik seperti Majenang, Sidareja, dan wilayah luar kota Cilacap berasal dari Oud-Bagelen (Kabupaten lama yang kini mencakup wilayah Banjarnegara dan sekitarnya). Di Majenang, Oud-Bagelen menyumbang sekitar 40,3% dari total imigran, di Sidareja mencapai 52%, dan di luar kota Cilacap bahkan 47,9%. Selain Oud-Bagelen, wilayah seperti Karanganyar (Blora) dan residen Cilacap lainnya juga menjadi sumber signifikan migran, menunjukkan adanya jaringan migrasi regional yang kuat dalam lingkup Karesidenan Kedu dan Banyumas.

<sup>57</sup> Boeke and Wertheim, *INHEEMSche BEVOLKING VAN MIDDEN-JAVA EN DE VORSTENLANDEN* (*Census of 1930 in Netherlands India – Volume II: Native Population in Middle-Java and the Native States of Java*).

Keseimbangan gender dari para imigran yang datang ke Majenang menunjukkan kecenderungan yang relatif seimbang antara jumlah pria dan wanita, meskipun terdapat variasi tergantung asal daerah migrasi. Berdasarkan data, jumlah imigran dari Oud-Bagelen yang masuk ke Majenang tercatat sebanyak 11.731 jiwa, terdiri atas 5.923 pria dan 5.808 wanita, dengan rasio pria terhadap wanita sebesar 102 per 100 wanita. Dari Kabupaten Cilacap, jumlah imigran mencapai 4.358 jiwa, terdiri dari 2.204 pria dan 2.154 wanita, dengan rasio yang juga seimbang yakni 102. Demikian pula imigran dari Banjoemas (di luar Karanganjar dan Cilacap) berjumlah 7.160 jiwa (3.646 pria dan 3.514 wanita) dengan rasio 104, serta dari Jawa Barat tercatat 3.890 jiwa (1.985 pria dan 1.905 wanita) dengan rasio 104.

Namun, keseimbangan ini berubah signifikan untuk migrasi dari Residen Pekalongan, yang mencatat 1.383 imigran ke Majenang, terdiri atas 816 pria dan 567 wanita, dengan rasio mencapai 144, yang menunjukkan dominasi besar migrasi pria. Demikian pula dari Jawa Timur, terdapat 131 imigran (70 pria dan 61 wanita) dengan rasio 115. Sebaliknya, dari Vorstenlanden (Solo dan Yogyakarta), tercatat 133 imigran (60 pria dan 73 wanita) dengan rasio hanya 82, yang berarti lebih banyak wanita yang bermigrasi ke Majenang dari daerah ini.

Kemudian, Keseimbangan antara jumlah pria dan wanita yang bermigrasi menunjukkan bahwa mobilitas ini bukan semata-mata terkait dengan migrasi tenaga kerja laki-laki, tetapi lebih mencerminkan migrasi rumah tangga atau keluarga. Hal ini memperkuat anggapan bahwa perpindahan ke wilayah Majenang tidak hanya bersifat sementara, melainkan cenderung menjadi migrasi permanen dengan tujuan

menetap, membangun kehidupan baru, dan memanfaatkan peluang ekonomi di tempat tujuan.

Berdasarkan dinamika migrasi ke wilayah Majenang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dapat disimpulkan bahwa pembukaan akses transportasi seperti jalur kereta api sejak tahun 1891 menjadi faktor pemicu utama meningkatnya arus imigrasi ke wilayah ini. Fasilitas transportasi tersebut memberikan akses yang lebih mudah bagi penduduk dari daerah padat, seperti Oud-Bagelen, untuk bermigrasi ke Majenang dan sekitarnya dalam rangka mencari lahan garapan baru, lingkungan hidup yang lebih sehat, serta peluang ekonomi yang lebih baik.

Data dari sensus tahun 1930 menguatkan bahwa Majenang merupakan salah satu tujuan utama migrasi di wilayah Cilacap, dengan 40,3% imigran berasal dari Oud-Bagelen. Fenomena migrasi ini tidak hanya melibatkan individu, melainkan juga rumah tangga secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dalam keseimbangan gender yang cukup merata: dari Oud-Bagelen terdapat 5.923 pria dan 5.808 wanita, serta dari Kabupaten Cilacap sebanyak 2.204 pria dan 2.154 wanita, menunjukkan bahwa perpindahan bersifat keluarga atau rumah tangga, bukan sekadar migrasi tenaga kerja laki-laki.

Migrasi ke Majenang pada masa kolonial mencerminkan transformasi struktural akibat keterbatasan lahan, tekanan demografis, dan ketimpangan regional, yang diperkuat oleh pengembangan infrastruktur transportasi kolonial dan tercermin dalam arus migrasi keluarga yang bersifat menetap. Dengan demikian, mobilitas penduduk ke Majenang tidak hanya menjadi respons atas tekanan lokal,

tetapi juga bagian dari pola migrasi regional yang kompleks dan terencana dalam konteks perubahan sosial-ekonomi Jawa awal abad ke-20.

### **3.3. Pendidikan dan Keagamaan**

Sosial bukan hanya sekedar hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, akan tetapi sosial juga menyangkut semua lini kehidupan manusia. Kesejahteraan sosial tidak hanya sekedar kemiskinan dan kesejahteraan manusia secara materil tetapi menyangkut bagaimana kehidupan pendukung manusia itu, salah satunya pendidikan.

Di tahun 1915-1935, pendidikan di Majenang mencerminkan dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda dan kondisi sosial masyarakat setempat. Di tengah tekanan kolonial pada periode tersebut, sistem pendidikan formal mulai diperkenalkan melalui sekolah sekolah desa yang didirikan untuk memberikan pendidikan dasar bagi rakyat pribumi.

Akses ke pendidikan formal masih sangat terbatas. Sebagian besar sekolah hanya tersedia untuk anak-anak dari keluarga elite atau pegawai pemerintah, sementara masyarakat umum khususnya di pedesaan sering terhalang oleh kemiskinan dan jarak geografis. Di sisi lain, pendidikan agama memainkan peran yang signifikan dalam membentuk masyarakat Majenang. Pesantren Cigaru, yang didirikan pada awal ke-20 menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah ini. Di pesantren ini, santri belajar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fiqh dan tasawuf yang berkontribusi pada penguatan identitas keagamaan masyarakat. Pendidikan agama tidak hanya berfokus pada pengajaran formal tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan sosial dan penyebaran nilai-nilai moral.

Selama periode ini, masyarakat Majenang mulai menunjukkan kesadaran pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan adanya sekolah seperti pesantren ini membuat Majenang perlahan membangun basis intelektualnya meskipun perkembangan ini berjalan lambat akibat kendala struktural dan politik.

Masyarakat Majenang yang merupakan mayoritas memeluk ajaran Islam pada waktu itu juga ternyata sudah difasilitasi oleh pemerintah kolonial, secara peribadatan mereka diperbolehkan menjalankan syariat Islam dan memiliki rumah ibadah. Hal ini terlihat dalam surat kabar *de Locomotief* edisi 03 Februari 1932, artikel ini mencatat restorasi besar-besaran terhadap masjid di Madjenang. Masjid tersebut berada di sebelah kiri *aloon-aloon* (alun-alun), menunjukkan bahwa lokasinya berada di pusat aktivitas masyarakat. Hingga saat ini, lokasi Masjid Raya Majenang masih berada di sebelah kiri atau arah Barat dari alun-alun Majenang. Menurut surat kabar tersebut dengan jelas menyebutkan lokasi beberapa tempat diantaranya yaitu, lokasi kantor Wedana yang berada di Utara alun-alun, Masjid di sebelah Barat, dan Poliklinik di sebelah Timur.<sup>58</sup> Hingga saat ini yang tersisa hanya Masjid dan Kantor Wedana/Kecamatan yang lokasinya masih sama, untuk poliklinik kemungkinan berada di tanah yang sekarang menjadi UPT Kebersihan Persampahan hingga Bank BRI Unit Majenang. Kembali lagi membahas tentang restorasi Masjid, terlihat bahwa pada masa kolonial sendiri masih memperbolehkan umat Islam untuk beribadah dengan tenang dan nyaman di Masjid Rayanya, bahkan mereka memfasilitasinya dengan melakukan pemugaran atau restorasi. Restorasi

---

<sup>58</sup> Kollf De Groot, ‘Missigit Gerestaureerd’, *De Locomotief* (1932).

ini tidak hanya memperindah bangunan, tetapi juga memperkuat peran masjid sebagai pusat keagamaan dan sosial dalam kehidupan masyarakat Majenang kala itu. Peningkatan kondisi fisik masjid menggambarkan perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai spiritual dan fungsi sosial masjid, serta upaya memperkuat identitas Islam di tengah arus modernisasi yang dibawa oleh pembangunan kolonial.

**Gambar 3. 4 Peta Satelit Lokasi Alun-alun Majenang**



Sumber: Google Maps

### 3.4. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Artikel surat kabar *de Locomotief* edisi 03 Februari 1932 menunjukkan bahwa Majenang sedang mengalami perkembangan dalam bidang pelayanan kesehatan, ditandai dengan pembangunan sebuah poliklinik di kawasan pusat kota (Alun-alun). Lokasinya strategis, yaitu di sebelah kanan atau timur alun-alun Majenang dan Kantor Kawedanaan. Meskipun bangunan tersebut masih sederhana dan bersifat darurat, rencana jangka panjangnya adalah untuk mengganti bangunan

tersebut dengan fasilitas permanen di masa depan. Di daerah sekitar Wanareja,<sup>59</sup> pembangunan poliklinik serupa juga sedang berlangsung, menandakan adanya kebijakan perluasan layanan kesehatan masyarakat yang lebih merata di wilayah tersebut. Ini mencerminkan upaya pemerintah kolonial atau otoritas setempat dalam meningkatkan akses kesehatan bagi penduduk, sekaligus menjadi indikator pentingnya Madjenang dalam jaringan pelayanan publik di wilayah Karesidenan Banyumas.

Pada tahun 1918, dunia dilanda oleh wabah virus mematikan yang dikenal sebagai Flu Spanyol atau H1N1. Di wilayah Hindia Belanda, wabah ini muncul dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi antara bulan Juli hingga September 1918, dengan tingkat kematian yang masih relatif rendah. Diperkirakan, penyebaran awal bermula dari wilayah Sumatera sebelum meluas ke Jawa dan Kalimantan. Gelombang kedua muncul pada akhir November hingga Desember 1918, dengan tingkat penularan yang jauh lebih tinggi. Bahkan, menurut laporan dari Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda (*Burgerlijken Geneeskundigen Dienst*), tidak ada satu pun wilayah di koloni tersebut yang luput dari serangan Flu Spanyol.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Kollf De Groot, ‘Bouw Poliklinieken’, *De Locomotief* (1932).

<sup>60</sup> Ravando, *Perang Melawan Influenza: Pandemi Flu Spanyol Di Indonesia Masa Kolonial, 1918 - 1919* (Gramedia, 2020).